

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan/atau sumber lainnya

- Andriani. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2016, Desember). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System. *Jurnal InFestasi*, 12, 203-2016.
- Aribowo, I., Zulvina, S., & Bandiyono, A. (2017). *Pengantar Hukum Pajak*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Maharani, E. A., & Sukma, R. F. (2021). Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Boga Oleh Puskesmas Gondang Serta Prosedur Pemindahbukuan Pajak Karena Kesalahan Saat Penyetoran. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Maulida, R. (2020). *Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 Atas Jasa Katering Oleh Bendahara KPP Pratama Jember*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Purnomo, A. W. (2014). *Mekanisme Penghitunga, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo*. Jember: Universitas Jember.
- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3, 471-492.
- Sorongon, C. T. (2014). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2, 704-714.
- Wahyudi, D. (2018). *Modul Pemotongan dan Pemungutan Pajak*. Jakarta: Pusdiklat Pajak.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Keuangan. (2021). *Informasi APBN 2021*
- Kementerian Keuangan (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

- Kementerian Keuangan (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (2017). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (2018). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (2019). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (2020). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020
- Pemerintah Gubernur Kalimantan Tengah (2016). Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
- Pemerintah Gubernur Kalimantan Tengah (2021). Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020
- Republik Indonesia. (2018). *LKPP Tahun 2018*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). *LKPP Tahun 2019*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *LKPP Tahun 2020*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

- Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan
- Republik Indonesia (2008). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana DIMaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Republik Indonesia (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Republik Indonesia (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /PMK.010/2015 Tentang Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran
- Republik Indonesia (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
- Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2022 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai